

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatkan produktivitas suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta diperlukannya penerapan Teknologi Informasi (TI) pada setiap bidang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam menuju *Society 5.0* merupakan gerakan yang diupayakan untuk mendukung segala kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih efisien. Selain itu, penerapan kemajuan Teknologi Informasi (TI) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh besar pada instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Teknologi Informasi (TI) banyak digunakan oleh organisasi atau suatu lembaga guna meningkatkan dalam menyalurkan dan mendistribusikan informasi dalam mencapai kebutuhan informasi. Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis tentu perlu diterapkan tata kelola, yang mana TI merupakan landasan utama dalam pencapaian tersebut. Adanya tata kelola TI yang diterapkan oleh suatu instansi, maka terciptanya TI yang terkelola dengan struktur yang baik, tentu memiliki sinergi aktif dalam keperluan perencanaan dan pengendalian operasi suatu instansi (Faraby, 2022).

Salah satu instansi pemerintah yang memanfaatkan adanya perkembangan TI adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kemendagri RI memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara untuk membantu Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Adanya tanggung jawab besar yang diemban oleh Kemendagri RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu Presiden, maka muncul sejumlah langkah transformasi digital yang diterapkan oleh Kemendagri RI dalam memenuhi pelayanan publik menyeluruh ke setiap daerah di Indonesia.

Berdasarkan data dari KemenPAN-RB, Indeks SPBE Nasional terus alami kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 lalu capaian Indeks SPBE Nasional berada pada angka 1,98 dan kini meningkat pesat di angka 2,34 dengan skala 1-5 pada Tahun 2022. Kemendagri RI terdiri dari 16 struktur bagian, yang mana tiap direktorat memiliki SPBE masing-masing dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja. Namun dari data yang diperoleh, nyatanya pencapaian kenaikan Indeks SPBE

Nasional masih terdapat permasalahan dari inovasi yang dikembangkan oleh Kemendagri RI dalam pemanfaatan TI. Beberapa aplikasi yang diluncurkan oleh Kemendagri RI masih memiliki kendala, baik dari infrastruktur yang kurang memadai di daerah tertentu dengan baik hingga fitur dari aplikasi tidak berfungsi dengan baik. Dari sisi infrastruktur, di daerah 3T dan sebagian besar bagian Timur hingga saat ini masih terkendala proses sinyal. Sehingga keberadaan teknologi konsultasi yang disediakan Kemendagri guna mencegah terjadinya praktik korupsi, baik lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Perlu lebih diperhatikan lagi dari segi teknis dan dukungan anggaran, dengan membuat peta jalan sampai kapan aplikasi dapat digunakan dengan efektif di daerah (Arman, 2022).

Adapun untuk SPBE yang ada pada salah satu Ditjen Kemendagri RI, yaitu Ditjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) dari observasi dan wawancara dengan tim Data dan Sistem Informasi, diperoleh informasi bahwa SOP yang diterapkan masih dalam pengembangan, belum adanya ketetapan SOP yang jelas dan teratur dalam penggunaan TI yang ada di lingkungan Ditjen Polpum berbasis *e-governance*. Sementara itu, masih terdapatnya kendala pada proses bisnis yang harus disesuaikan dengan faktor perubahan regulasi dan kendala penyesuaian infrastruktur pada kegiatan operasional TI yang ada di Ditjen Polpum. Adanya keterbatasan sumber daya untuk mengintegrasikan proses bisnis berbasis *e-governance* dengan keterbatasan pengajuan anggaran dana yang harus dianggarkan 1 tahun sebelum dilakukan pengembangan. Sehingga menjadi salah satu masalah besar, yang menyebabkan TI yang ada mengalami kendala untuk dikembangkan secara cepat sesuai dengan perubahan regulasi dan perubahan proses bisnis dalam memenuhi kebutuhan. Walaupun dari hasil observasi pemanfaatan teknologi yang sedang berjalan sudah cukup memadai kebutuhan, namun perlu dilakukan penyesuaian teknologi yang diharapkan agar fitur yang ada lebih mudah digunakan.

Selain itu, perlu adanya SOP yang teratur untuk mengantisipasi resiko maupun masalah yang pernah terjadi sebelumnya dapat terjadi kembali, baik dari segi *tools* yang perlu digunakan hingga pemantauan keamanan data. Melalui permasalahan yang diperoleh peneliti melalui observasi, diskusi, dan wawancara bersama tim Data dan Sistem Informasi di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Perlu dilakukan pengukuran dan perbaikan berdasarkan evaluasi tata kelola TI untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI yang dimiliki dalam mendukung proses bisnis yang berjalan. Salah satu *Framework* yang dapat diimplementasikan untuk standar

evaluasi/audit adalah COBIT 2019, yang merupakan pembaharuan dari versi COBIT sebelumnya (Faraby, 2022). Dengan kata lain dapat digaris bawahi, bahwa COBIT 2019 merupakan versi terbaru yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

COBIT 2019 memiliki sifat fleksibel dan detail, sehingga memberikan kemudahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan teknologi seiring berubahnya zaman. Selain itu, COBIT 2019 memiliki desain faktor toolkit yang akan mendesain kondisi tata kelola TI dari Ditjen Polpum, sehingga akan memberikan hasil yang mempermudah dalam proses evaluasi dan penentuan kinerja. Adanya kemudahan dalam penyesuaian yang sesuai dengan diperlukannya evaluasi dalam mempertahankan kenaikan angka SPBE Nasional yang masih terdapat beberapa masalah TI, sehingga perlu dilakukan persiapan dalam membangun *e-governance* yang sesuai dengan proses bisnis dengan pemanfaatan TI. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian “**Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 (Studi Kasus: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)**” guna untuk memberikan inovasi dalam bentuk rekomendasi perbaikan pengelolaan di masa mendatang dari ditemukannya kekurangan yang ada pada tata kelola TI Kemendagri RI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui objektif proses yang didapatkan melalui *Design Factor Toolkit* untuk menunjukkan nilai kepentingan yang sesuai dengan identifikasi masalah yang ada pada Kemendagri RI?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengetahui *Capability Level* dan *Maturity Level* Teknologi Informasi saat ini dan yang diharapkan pada Kemendagri RI?
3. Bagaimana memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat berdasarkan hasil dari *Capability Level* dan *Maturity Level* pada Kemendagri RI?

1.3. Tujuan

Tujuan dari dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui objektif proses yang menunjukkan nilai kepentingan pada Kemendagri RI melalui *Design Factor Toolkit*.

2. Mengetahui langkah-langkah untuk mendapatkan *Capability Level* dan *Maturity Level* Teknologi Informasi saat ini dan yang diharapkan pada Kemendagri RI.
3. Menghasilkan rekomendasi perbaikan Tata Kelola TI berdasarkan *Framework* COBIT 2019 di Kemendagri RI dalam mencapai *good governance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses bisnis layanan TI pada Tata Kelola TI di Kemendagri RI.
2. Menggambarkan solusi dari pelayanan TI pada Tata Kelola TI di Kemendagri RI dari masalah yang ditemukan berdasarkan rekomendasi perbaikan sesuai dengan *Framework* COBIT 2019.
3. Membantu dalam pengambilan keputusan terhadap perubahan kebutuhan proses bisnis layanan TI pada Tata Kelola TI di Kemendagri RI.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan persoalan pada penelitian, maka dibuat batasan masalah dalam penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan hanya pada lingkup Tata Kelola Teknologi Informasi di Kemendagri RI pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Evaluasi dilakukan menggunakan *Framework* COBIT 2019 berfokus hasil *Design Factor Toolkit* dengan hasil nilai objektif proses memiliki nilai kepentingan ≥ 50 .
3. Evaluasi dilakukan guna memberikan solusi dalam meningkatkan nilai Indeks SPBE Nasional.
4. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kerangka kerja dari *Framework* COBIT 2019 hingga menghasilkan rekomendasi perbaikan.

1.6. Luaran Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan Tata Kelola TI di Kemendagri RI berdasarkan *Framework* COBIT 2019, sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam

pengembangan proses bisnis layanan TI di Kemendagri RI dalam memenuhi kebutuhan proses bisnis.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, luaran penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari tata kelola dengan *Framework* COBIT 2019 dan tinjauan terhadap studi terkait dengan topik penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tahapan penelitian, uraian penelitian, metode penelitian yang mencakup metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, serta jadwal rencana penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah organisasi, struktur dan fungsi organisasi, tahapan evaluasi menggunakan COBIT 2019, perhitungan dan penentuan *Capability Level* dan *Maturity Level* serta rekomendasi kepada Ditjen Polpum Kemendagri RI.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi pembahasan hasil kesimpulan dari uraian di bab-bab sebelumnya dan saran sebagai solusi yang dapat diambil oleh Ditjen Polpum Kemendagri RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan TI.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN